

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hutan merupakan suatu yang dijaga dan digunakan oleh masyarakat di berbagai tempat, suatu hutan dapat dikatakan sebagai hutan maka masih mempunyai pepohonan yang rimbun dan hijau. Sering kita ketahui hutan selain digunakan oleh masyarakat pertanian maka digunakan untuk alat perumahan pada jaman dahulu. Pada jaman dahulu penebangan hutan masih dengan skala kecil dan tidak berlebihan sehingga hutan masih terjaga oleh masyarakat setempat. Biasanya masyarakat juga sangat ketergantungan dengan hutan yang masih rimbun dan hijau. Masyarakat pedesaan menggunakan hutan sebagai tempat mereka mencari makan dan sebagai lahan pertanian mereka. Masyarakat dengan mengeksploitasi hutan melalui cara-cara yang masih alami dan tidak mengganggu ekosistem hutan sehingga hutan masih dapat ditanami kembali dan menjadi hijau serta kelestariannya terjaga.

Di era sekarang hutan terbagi menjadi beberapa kelompok hutan yang dibagi oleh dinas kehutanan berdasarkan wilayah yang ditentukan oleh pemerintah daerah guna menjaga kelestarian hutan supaya tidak dieksploitasi dengan berlebihan. Hutan menjadi salah satu yang terpenting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah. Hutan memiliki banyak fungsi terhadap lingkungan baik

mencegah bencana alam dan menjaga ekosistem udara yang segar. Sekarang ini hutan dibagi menjadi beberapa kelompok seperti di daerah-daerah yang masih banyak hutannya. Kita ketahui di dinas kehutanan banyak data hutan seperti, Hutan Konservasi (HK), Hutan Produksi (HP), Hutan Rakyat (HR), dan Hutan Tanam Industri (HTI). Hutan tanam industri merupakan tidak disemua tempat namun ada di beberapa tempat di Indonesia yang telah dimasukkannya Hutan Tanam Industri (HTI). Salah satunya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah provinsi baru hasil dari pemekaran provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2000. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki daerah yang tropis dan memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti hasil tambang Pasir Timah, hasil pertanian Biji Lada putih dan sumber daya alam lainnya. Secara sosial budaya Bangka Belitung memiliki bermacam kebudayaan yang unik dan masih dapat dipertahankan hingga saat ini. Provinsi Bangka Belitung yang merupakan pengekspor sumber daya berupa pasir timah yang cukup besar. Sehingga menjadikan provinsi Bangka Belitung salah satu penghasil timah terbesar di Indonesia. Namun dari eksplotasi sumber daya timah secara berlebihan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan alam dalam hal ini kerusakan hutan.

Masuknya perusahaan HTI di Bangka Belitung tidak terlepas dari pelaksanaan program kementerian kehutanan untuk melindungi kelestarian hutan. Wilayah yang akan dicanangkan oleh pemerintah atas perintah kementerian kehutanan RI sebagai wilayah perusahaan HTI ialah Kabupaten Bangka Barat. Pihak HTI sudah melakukan survei lapangan di Kabupaten Bangka Barat yang

terdapat di satu kecamatan yakni kecamatan Simpang Teritip. Kabupaten Bangka Barat sendiri memiliki 6 kecamatan untuk saat ini, namun yang menjadi lahan HTI hanya terdapat di Kecamatan Simpang Teritip. Masyarakat Kecamatan Simpang Teritip dari sisi mata pencaharian mereka berkebun atau bertani. Oleh karena itu, masyarakat khususnya Kecamatan Simpang Teritip bertentangan dengan masuknya aktivitas HTI di wilayah mereka.

Masyarakat Kecamatan Simpang Teritip melakukan gerakan penolakan menunjukkan bahwa adanya bentuk kekecewaan yang di rasakan masyarakat. Ataupun adanya suatu kebijakan yang tidak di harapkan masyarakat unuk dalam hal ini yaitu hadirnya HTI di wilayah mereka. Masyarakat yang mayoritas petani di rasa hadirnya HTI akan mempersulit masyarakat dalam bertani. Adapun Masyarakat Kecamatan Simpang Teritip memiliki alasan tersendiri mengapa masyarakat menolak HTI masuk kedaerah mereka. Alasan tersebut merupakan mengapa masyarakat menolak akan hadirnya HTI. Adapun alasan mengapa masyarakat Kecamatan Simpang Teritip menolak hadirnya HTI antara lain.

1. Masyarakat Kecamatan Simpang Teritip tidak mengetahui adanya rekomendasi Bupati Bangka Barat nomor: 522/671/2.02.01/20009 tanggal 16 september 2009 tentang IUPHHK HTI atas nama PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) karen tanpa danya sosialisasi dari pihak terkait.
2. Masyarakat Kecamatan Simpang Teritip merasa resah, jika kawasan hutan tersebut akan dikuasai oleh perusahaan pengembang HTI.

3. Hutan produksi (HP) yang saat ini sudah beralih fungsi menjadi HTI sesuai dengan surat keputusan menteri kehutanan nomor : SK.336/menhut-II/2013 tanggal 13 mei 2013 tentang SK Iup HHK-HTI yang menunjukan PT BRS sebagai pemegang izin sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber penghidupan dan penunjang perekonomian masyarakat.
4. Lahan dan hutan di Kecamatan Simpang Teritip sudah sangat berkurang karena sudah di dimanfaatkan oleh masyarakat dan dikelola oleh beberapa perusahaan.
5. Masyarakat Kecamatan Simpang Teritip menginginkan hutan kawasan tersebut di kembalikan ke masyarakat untuk dimanfaatkan dan dilestarikan serta menjaga adat budaya dan tatanan sosial di masyarakat.

Dari beberapa alasan di atas menunjukan bahwa dengan hadirnya HTI di Kecamatan Simpang Teritip memberikan dampak negatif. Masyarakat yang tidak mengetahui terlebih dahulu mengenai kebijakan tentang perizinan HTI merasa dikejutkan dengan adanya aktivitas yang sudah di lakukan oleh pihak PT BRS. Di mana masyarakat merasa takut apabila hutan yang merupakan salah satu kebutuhan masyarakat akan di kuasai oleh PT BRS. Masyarakat yang sangat katergantungan dengan hutan membuat mereka tidak menginginkan HTI tersebut berada di wilayah mereka. Sebagaimana hutan menjadi salah satu pusat perekonomian masyarakat Kecamatan Simpang Teritip. Hutan di Kecamatan Simpang Teritip sudah mulai berkurang karena semakin banyak penduduk yang

bertani lada dan juga sudah adanya beberapa wilayah Hutan yang di jadikan PT sawit.

Penolakan tersebut tidak lain disebabkan karena adanya dampak negatif dari keberadaan HTI memunculkan gerak sosial yang dilakukan masyarakat. Seperti yang di sampaikan Hadiwinata (dalam Triwibowo, 2006:2) *civil society* adalah kelompok-kelompok asosiasi yang bisa berfungsi sebagai penghambat kekuasaan negara (sehingga dengan sendirinya selalu berseberangan dengan negara), sebagai perantara yang budiman antara kepentingan negara dan aspirasi lokal, atau sebagai rangkaian kelembagaan sosial yang saling berinteraksi antar sesamanya dalam suatu struktur formal yang bisa memfasilitasi atau menghambat tata kelola negara.

Hadirnya HTI di Kecamatan Simpang Teritip memunculkan polemik di antara masyarakat. Keberadaan HTI pada intinya untuk melindungi wilayah hutan dan mensejahterakan masyarakat. Namun keberadaan HTI tersebut tidak menutup kemungkinan menimbulkan konflik antara pengelola dengan masyarakat. Adapun konflik yang terjadi antara pengelola dan masyarakat antara lain dimana masyarakat Kecamatan Simpang Teritip melakukan upaya gerakan penolakan atas hadirnya aktivitas HTI. Gerakan sosial direpresentasikan oleh cita-cita yang akan diusung, oleh karena itu gerakan sosial memiliki ciri inklusif yang bersedia bekerja untuk suatu perubahan (Syawaludin, 2014).

Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana pola gerakan sosial masyarakat terhadap penolakan aktivitas HTI

di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat. Penelitian ini juga akan memfokuskan pada apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan gerakan-gerakan sosial yang di lakukan masyarakat Kecamatan Simpang Teritip terhadap penolakan aktivitas hutan tanam industri (HTI).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk gerakan sosial masyarakat terhadap penolakan aktivitas HTI di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat?
2. Bagaimana dukungan dan hambatan gerakan sosial masyarakat terhadap penolakan aktivitas HTI di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk gerakan sosial masyarakat terhadap penolakan aktivitas HTI di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.
2. Untuk mengetahui Bagaimana dukungan dan hambatan gerakan sosial masyarakat terhadap penolakan aktivitas HTI di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat?

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi:

### 1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan disiplin ilmu sosiologi terkait dengan gerakan sosial masyarakat. Selain itu, di harapkan penelitian ini juga dapat menjadi acuan serta referensi para pelaku keilmuan, terutama bagi pengembangan penelitian di bidang ilmu sosiologi, terkait dengan permasalahan yang sama.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai gerakan sosial untuk melakukan perubahan sosial dan bagaimana seharusnya melakukan gerakan sosial. Disamping itu penelitian ini juga memberi pemahaman bagi masyarakat dalam melakukan gerakan sosial agar tidak melanggar peraturan undang-undang sehingga tidak menimbulkan konflik.

#### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan ditingkat kabupaten/kota, kecamatan sampai pada tingkat desa untuk mengkaji dan melakukan pertimbangan khususnya terkait dalam perizinan dalam membuka lahan untuk dilakukan HTI.

## E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ilmiah, sebuah penelitian harus didukung dengan literatur tambahan agar penelitian menjadi ilmiah. Peneliti mencantumkan beberapa hasil peneliti terdahulu yang relevan dengan yang di lakukan ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Holilullah (2016) yang berjudul *harmonisasi kelestarian hutan di Dusun Bukit Tulang Kecamatan Belinyu dalam perspektif modal sosial*. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana terjadinya harmonisasi dalam menjaga kelestarian hutan dengan nilai-nilai lokal yang ada di tengah masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya harmonisasi kelestarian hutan dan mengidentifikasi nilai-nilai lokal yang ada di tengah masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan alam hutan.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keharmonisasi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan telah melalui proses panjang. Masyarakat membangun suatu nilai-nilai lokal yang mereka sepakati bersama yang sangat baik bagi terwujudnya kelestarian lingkungan alam hutan. Nilai-nilai lokal yang dimaksud seperti, dilarang menebang pohon sembarangan sekaligus menjual kayu hasil hutan kecuali kayu tersebut didapatkan pada lahan yang akan dijadikan ladang atau kebun, melarang orang asing tinggal dilingkungan mereka, tentunya larangan tersebut sebagai bentuk kekhawatiran masyarakat setempat jika ada orang asing maka mereka akan melanggar pantangan-pantangan yang ada seperti menebang pohon sembarangan maupun menjual kayu hasil hutan.



Adapun persamaan dengan penelitian diatas dengan penelitian yang akan saya lakukan yakni, sama-sama memfokuskan bagaimana pola yang dilakukan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan sebagai kajian utama dalam penelitian. Sedangkan perbedaan dalam penelitian diatas dengan penelitian yang saya lakukan yakni, penelitian yang dilakukan oleh peneliti diatas lebih memahami pada terjadinya harmonisasi dan nilai-nilai lokal dalam menjaga kelestarian hutan di Dusun Bukit Tulang Kecamatan Belinyu, sementara penelitian yang saya lakukan yaitu mencari bagaimana pola-pola gerakan sosial masyarakat terhadap penolakan aktivitas HTI.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Izudin(2015) yang berjudul *gerakan sosial serikat petani daerah istimewa Yogyakarta periode 2006-2015(strategi, pola dan tantangan)*. Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana strategi, pola, dan tantangan dalam melakukan gerakan sosial pada masyarakat serikat petani daerah istimewa Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi, pola dan tantangan dalam melakukan gerakan sosial pada masyarakat serikat petani daerah istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa gerakan sosial pada masyarakat petani yang dilakukan oleh serikat petani DIY terdiri dari mobilitas dan konsolidasi organisasi, menyuarakan hak-hak petani, mengubah seteru menjadi sekutu,gerakan sistem petani terpadu, gerakan organik dari akar rumput, dan menciptakan sekolah alternatif. Dalam melakukan gerakan sosial strategi yang dilakukan oleh serikat petani DIY yaitu, strategi gerakan berbasis pengorganisasian,

strategi gerakan berbasis hak asasi petani dan strategi gerakan berbasis penyadaran. Adapun tantangan yang dihadapi serikat petani DIY yaitu kasus agraria yang berkepanjangan yang dapat menghambat proses perjuangan, gerakan petani masih *under ground* karena rendahnya tingkat pendidikan, dan seakan negara mengayomi petani masih setengah hati.

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan saya lakukan yakni, sama-sama dalam melakukan gerakan sosial dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai kajian utama dalam penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan saya lakukan yakni, penelitian yang saya akan lakukan hanya berbasis bagaimana pola gerakan sosial yang di lakukan masyarakat Kecamatan Simpang Teritip, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Izudin lebih ke permasalahan bagaimana struktur gerakan sosial serikat petani DIY pada priode 2006-2015.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ricka Octaviani(2015) yang berjudul *gerakan sosial korban lusi (lumpur Sidoarjo)*. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai bagaimana bentuk-bentuk gerakan sosial korban lumpur Sidoarjo dan faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pembentukan gerakan sosial korban lumpur Sidoarjo. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana bentuk-bentuk gerakan sosial dan faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pembentukan gerakan sosial korban lumpur Sidoarjo.

Penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan sosial pada korban lumpur Sidoarjo dikarenakan adanya timbul rasa kesamaan nasib yang ingin memperjuangkan keadilan dan ganti rugi akibat bencana luapan lumpur lapindo. Bentuk-bentuk gerakan sosial seperti KLM (korban lumpur menggugat), GKLL (gerakan korban lumpur lapindo), PPKL (paguyuban peduli korban lumpur). Faktor pendorong dalam pembentukan gerakan sosial korban lumpur Sidoarjo meliputi mempererat tali silaturahmi korban lumpur Sidoarjo, sedangkan faktor penghambat pembentukan gerakan sosial korban lumpur Sidoarjo yakni susahya menemui pihak BPLS, faktor perizinan dalam melakukan aksi demo yang sulit.

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan saya lakukan yakni penelitian memfokuskan pada bagaimana gerakan sosial sebagai bentuk dalam memperjuangkan haka-hak masyarakat sebagai kajian utama dalam penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan saya lakukan yakni, lebih memahami pada pendorong dan penghambat dalam melakukan gerakan sosial pada korban lumpur Sidoarjo, sedangkan penelitian yang saya lakukan yakni mencari pola-pola gerakan sosial masyarakat terhadap penolakan aktivitas HTL.

#### **F. Kerangka Teoritis**

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori gerakan sosial Charles Tilly tentang sebuah tindakan berkelanjutan secara bertahap, pertunjukan dan kampanye yang dilakukan orang biasa, mereka membuat tuntutan secara kolektif terhadap orang lain. Dalam mewujudkan tindakan yang berkelanjutan

secara bertahap masyarakat harus memiliki persiapan dalam berpartisipasi dalam ruang publik politik yaitu minat, organisasi, mobilisasi, tindakan kolektif dan kesempatan. Minat dalam konteks ini peneliti mengartikan sebagai cita-cita perjuangan, organisasi diartikan sebagai wadah aspirasi yang menampung segala persoalan, mobilisasi diartikan sebagai potensi melakukan gerakan, tindakan kolektif diartikan sebagai pertunjukan yang disampaikan ke dalam bentuk aksi, kesempatan diartikan sebagai momentum dan isu yang dihadapi masyarakat. Dari kelima persiapan tersebut diharuskan tindakan dapat dimiliki oleh masyarakat (Izudin, 2015).

Selain mewujudkan tindakan dalam partisipasi ruang politik, Tilly juga menekankan pada mobilisasi sumber daya. Mobilisasi sumber daya adalah keseluruhan saran, baik yang formal maupun yang informal, yang digunakan untuk memobilisasi dan melibatkan orang dalam melakukan tindakan kolektif. Aspek yang menjadi salah satu pusat perhatian dalam perspektif *resource mobilization* adalah jaringan kerja dalam gerakan sosial. Tilly melihat bagaimana peran penting yang dilakukan oleh organisasi atau jaringan dalam melakukan aksi gerakan sosial yang kolektif.

Terakhir, Tilly mengembangkan model mobilisasi dengan tindakan kolektif, menyatakan bahwa *the main determinant* dari mobilisasi kelompok meliputi: organisasi, *interes*, peluang atau ancaman, dan kemampuan kelompok dalam menyikapi represi atau fasilitasi. Tindakan kolektif yang dilakukan *contender* (pembangkang, penentang) merupakan *resultante* dari aspek-aspek kekuasaan

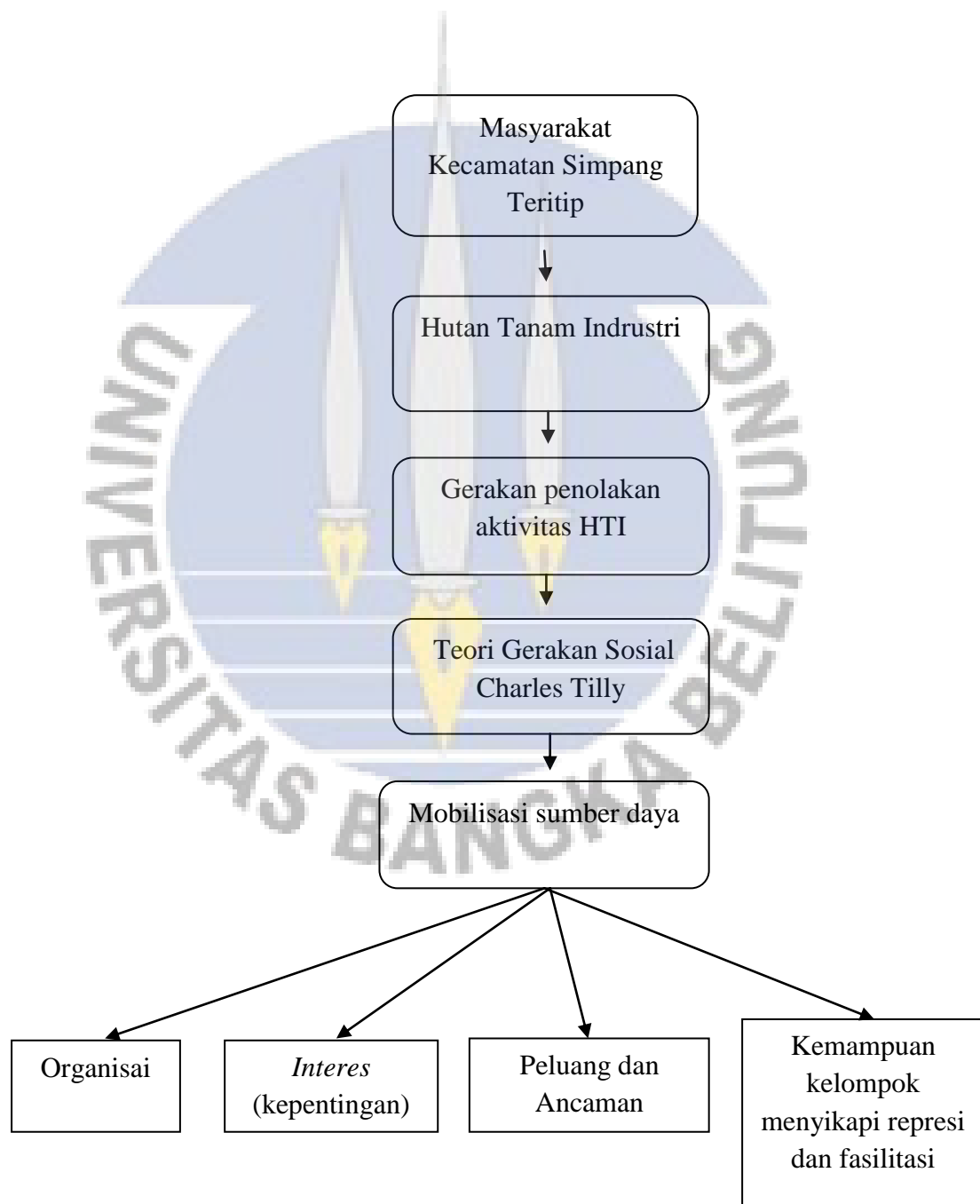
(*power*), mobilisasi, peluang (*opportunity*), dan ancaman yang saling berhadapan dengan interes yang ada (Sukmana: 2016).

Dalam analisis Tilly, masyarakat sipil menjadi wilayah di mana aktor-aktor sosial menghimpun, mengorganisasikan, dan memobilisasi penentangan terhadap negara dan struktur ekonomi. Kelompok-kelompok solidaritas tradisional pun digantikan oleh selebaran asosiasi yang lebih otonom. Karya historis Tilly menghubungkan pergeseran lokus kekuasaan secara bersesuaian dengan pergeseran dalam bentuk-bentuk aksi kolektif. Tilly mengidentifikasi dua unsur masyarakat yang saling berlawanan, entitas negara dan mobilisasi. Entitas negara mengacu pada sistem kekuasaan, ancaman, represi, dan yang kedua pada kepentingan aktor-aktor, organisasi, dan mobilisasi. Dalam dua unsur tersebut saling berpengaruh antara keduanya dalam bentuk barang kolektif ( Rajendra: 2010).

Dalam teori ini Tilly membahas mengenai gerakan sosial yang dilakukan secara bertahap, berkelanjutan melalui ruang publik politik yang menjadi sarana untuk melakukan suatu gerakan yang kolektif. Ruang politik yang dimaksud Tilly ialah wadah sebagai penampung inspirasi masyarakat yang nanti dapat di salurkan pada saat melakukan aksi gerakan. Tilly menekankan bahwa ruang publik politik merupakan awal terwujudnya mobilisasi sumber sehingga dapat menjalankan aksi atau tuntutan yang berkelanjutan, bertahap dengan strategi dan taktik yang di bentuk.

## G. Kerangka Bepikir

Dalam penelitian ini akan dibuat kerangka berpikir penelitian mempermudah pengarahannya proses penelitian secara benar. Adapun kerangka berpikir yang telah dirumuskan, yaitu:



Berdasarkan bentuk bagan di atas, untuk menganalisa permasalahan gerakan terhadap penolakan aktivitas HTI yang terjadi di Kecamatan Simpang Teritip. Masuknya HTI di Kecamatan Simpang Teritip menimbulkan permasalahan terhadap masyarakat. Namun pelaksanaan gerakan penolakan yang dilakukan masyarakat terhadap penolakan aktivitas HTI mungkin mendapatkan kendala dalam melakukan penolakan. Penolakan HTI secara tidak langsung memunculkan suatu solidaritas yang menjadikan masyarakat lebih kuat dalam menolak aktivitas HTI.

Kemudian untuk menganalisis gerakan terhadap penolakan aktivitas HTI di Kecamatan Simpang Teritip dilakukan dengan menggunakan teori gerakan sosial Charles Tilly mengenai bagaimana gerakan sosial dilakukan dengan sebuah tindakan yang berkelanjutan secara bertahap, pertunjukan dan kampanye. Dalam hal ini masyarakat menciptakan mobilisasi sumber daya sebagai sarana untuk melakukan gerakan penolakan. Mobilisasi sumber daya dengan model yang dikembangkan Charles Tilly sebagai tindakan kolektif yang meliputi; organisasi, *interest*, peluang dan ancaman dan kemampuan kelompok menyikapi represi dan fasilitasi. Hal ini menjelaskan bagaimana pola gerakan terhadap penolakan aktivitas HTI dan menganalisis apa kelemahan dan kelebihan dalam melakukan gerakan terhadap penolakan aktivitas HTI di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam memberikan pemahaman dari penelitian ini maka peneliti akan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan disusun dengan terstruktur. Adanya sistematika dalam penulisan ini akan membuat suatu penelitian menjadi terarah dan sistematika ini akan memudahkan pembaca dalam melihat arah dan isi dari penelitian yang di maksud. Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan kerangka teoritis. Pada bab ini menceritakan mengenai pemanfaatan hutan, sumber daya di Bangka Belitung, hadirnya HTI di Bangka Belitung dan mengarah pada penolakan HTI di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat. Selain itu bab ini juga menjelaskan tentang tujuan peneliti melakukan penelitian dan manfaat dilakukannya penelitian ini. Bagian terakhir bab ini menjelaskan teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

Bab II merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Pada bab II menceritakan tentang penetapan jenis penelitian yang digunakan serta objek dan lokasi yang akan dikaji peneliti. Dalam memperoleh data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada intinya pada bab ini memberikan gambaran tentang cara dalam memperoleh data dan cara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini.



Bab III merupakan gambaran umum penelitian yang terdiri dari gambaran kawasan Kecamatan Simpang Teritip, keadaan demografi, karakteristik dan status hutan Kecamatan Simpang Teritip. Pada bab ini menceritakan tentang luas wilayah dan batas-batas wilayah di Kecamatan Simpang Teritip, serta luas hutan yang di produksi dan di lindungi masyarakat. Selain itu bab ini juga menjelaskan mengenai populasi penduduk, mata pencaharian masyarakat dan kondisi sarana dan prasarana di Kecamatan Simpang Teritip.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian yang di lakukan peneliti terdiri dari bentuk gerakan penolakan HTI di Kecamatan Simpang Teritip, kemudian dilanjutkan dengan melihat kelemahan dan kelebihan dalam gerakan penolakan. Bab ini juga membahas mengenai analisis kajian teori yang digunakan peneliti dalam pemnelitian ini yaitu teori gerakan sosial Charles Tilly terhadap permasalahan penelitian dalam judul “Gerakan Penolakan HTI di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, impilkasi teori dari teori yang peneiliti gunakan dan saran. Bab ini membahas secara singkat, padat namum mewakili dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain menjelas kesimpulan bab penutup ini juga membahas implikasi dari teori yang digunakan peneliti dan saran untuk penelitian selanjutnya jika memang ada kesamaan dengan penelitian tersebut.